

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya dan wajib disyukuri.¹ Hutan memiliki tiga fungsi pokok yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi.² Namun saat ini sebagian hutan di Indonesia telah menjadi rusak yang disebabkan oleh berbagai hal antara lain kebakaran, peristiwa-peristiwa alam seperti gempa, longsor, dan banjir, hama dan penyakit; ternak serta perbuatan manusia termasuk usaha pertambangan.³

Kerusakan hutan yang disebabkan oleh usaha pertambangan pada kenyataannya telah menghambat terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan, usaha pertambangan tidak dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Obyek dari pertambangan itu sendiri adalah Mineral dan Batubara. Mineral dan Batubara merupakan salah satu kekayaan alam yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang

¹ *Penjelasan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan'*
http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/Undang_Undang_kehutanan1/penjelasan_umum.htm, 14 September 2009, hlm. 1

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

diamandemen ke-4, Bab XIV Pasal 33 ayat (3). Dengan adanya Hak Menguasai dari negara, negara diberikan kewenangan untuk mengatur bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang ada di dalamnya. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 ayat (2). Terbentuknya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 berimplikasi terhadap munculnya Undang Undang lain yang berkaitan dengan UUPA seperti Undang Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (selanjutnya akan disingkat dengan Pertambangan Minerba) dan Kehutanan.

Pembentukan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada awalnya dimaksudkan untuk mendukung pemeliharaan dan pemanfaatan hutan. Namun, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang membatalkan berlakunya ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 kerusakan hutan semakin tidak dapat dibendung lagi. Dengan berlakunya Perpu tersebut, perusahaan-perusahaan tambang yang tidak dapat beroperasi di kawasan hutan lindung dengan dikeluarkannya Undang Undang Kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (4) undang undang tersebut, kini dapat beroperasi lagi dengan menggunakan pola pertambangan terbuka setelah diberlakukannya Perpu tersebut. Perpu Nomor 1 Tahun 2004 kemudian diperkuat menjadi Undang Undang dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004. Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang Undang.

Kesempatan bagi pengusaha tambang untuk melakukan penambangan di kawasan hutan semakin terbuka lebar dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2008 tentang Jenis dan tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan. Ketentuan Pasal 1 angka (2) dan Pasal 2 PP tersebut pada intinya menjelaskan tentang diperbolehkan menyewa kawasan hutan untuk kegiatan penambangan dengan membayar tarif tertentu yang harus disetor secepatnya ke kas negara.

Pada dasarnya Pertambangan di hutan lindung bertentangan dengan Asas “Manfaat” yang diatur dalam Pasal 2 dan Prinsip Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup khususnya Pelestarian daya dukung lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (7) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan konsep pelestarian daya dukung lingkungan hidup, hutan lindung tidak dapat diubah atau dieksploitasi atau pun digunakan untuk kegiatan apapun termasuk pertambangan. Dengan kata lain hutan lindung harus dilestarikan. Namun pada kenyataannya, hutan lindung saat ini banyak mengalami kerusakan akibat masuk dan beroperasinya perusahaan pertambangan di kawasan hutan lindung tersebut.

Produk hukum lain, yang turut memberi peluang bagi para investor untuk membuka perusahaan tambang di kawasan hutan lindung adalah Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 27 ayat (4) Undang Undang tersebut pada intinya menyatakan bahwa wilayah konservasi dapat dijadikan kawasan pertambangan. Selanjutnya, pada Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Nomor 4 tahun 2009, dikatakan pula bahwa daerah konservasi yang akan diusahakan menjadi kawasan pertambangan harus mempunyai izin berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (yang selanjutnya disingkat IUPK). Namun pada kenyataannya, ketentuan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti yang terjadi di Kabupaten Nabire. IUPK yang dimiliki oleh para pengusaha tambang di kabupaten ini tidak dapat menjamin bahwa kegiatan pertambangan tidak akan merusak hutan. Hutan lindung tetap saja menjadi rusak akibat hadirnya perusahaan pertambangan di kawasan tersebut sekalipun perusahaan-perusahaan tersebut masuk dengan mengantongi izin dari pemerintah.

Dalam prakteknya, operasi pertambangan yang dilakukan di Indonesia telah menimbulkan berbagai dampak negatif. Pertama, pertambangan menciptakan bencana lingkungan karena pertambangan dilakukan secara terbuka (*open pit*).⁴

Kedua, pertambangan kurang meningkatkan *Community Development*. Keadaan demikian dapat menjadi pemicu timbulnya konflik.⁵ Ketiga, pertambangan dapat menjadi penyebab rusaknya sumber-sumber kehidupan

⁴ <http://suswono.multiply.com/journal/item/4>, Suswono, *Tambang Di Hutan Lindung*, 25 Januari 2010, hlm.1;

⁵ *Ibid.*

masyarakat. Keempat, pertambangan memicu terjadinya pelanggaran HAM. Keberadaan aparat keamanan dan militer sangat dibutuhkan oleh pihak perusahaan ketika perusahaan pertambangan pertama kali datang ke suatu lokasi. Hal tersebut disebabkan, aparat keamanan dan militer dibutuhkan untuk melakukan pengusiran-pengusiran dan kekerasan terhadap warga masyarakat setempat yang tidak mau pindah dari lokasi yang akan digunakan sebagai tempat beroperasi.⁶

Demikian pula dengan masalah pertambangan yang terjadi di Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire, Papua. Daerah ini merupakan daerah yang kaya akan tambang emas. Sejak tahun 2002, emas yang diburu masyarakat dari luar Distrik Uwapa maupun para pengusaha tambang yang ingin membuka usahanya di daerah tersebut selalu berujung pada konflik.⁷ Masyarakat setempat yang dahulu dapat dengan mudah memperoleh emas dari hasil mendulang, kini tidak memperoleh hasil apa apa lagi. Hal ini disebabkan para pengusaha tambang telah mengambil emas yang terdapat di daerah ini dengan alat-alat yang lebih canggih. Keadaan masyarakat semakin memburuk dengan perilaku para pengusaha yang setelah merusak dan menghancurkan wilayah pendulangan, meninggalkan begitu saja daerah tersebut tanpa melakukan rehabilitasi.

Dampak negatif lainnya yang timbul akibat masuknya para pengusaha tambang di daerah ini adalah timbulnya konflik antar masyarakat. Masyarakat

⁶ Ibid.

⁷ *Kilas balik info seputar Pertambangan Emas secara Illegal*, <http://simapi.blogspirit.com/archive/2005/07/22/kilas-balik-info-seputar-pertambangan-emas-secara-ilegal.html>, 29 November 2009, hlm. 1

Uwapa yang dahulu hidup rukun dan saling menghormati hak ulayat masyarakat perbatasan daerah Paniai, kini tidak lagi demikian. Konflik sering muncul antara kedua masyarakat tersebut yang disebabkan oleh saling memperebutkan hak ulayat masing-masing. Konflik juga sering muncul antara masyarakat dengan pengusaha pertambangan. Namun masyarakat selalu berada pada posisi yang lemah.⁸ Hal ini disebabkan pengusaha pertambangan mendapat perlindungan dari aparat keamanan setempat. Setiap kali muncul demo dari masyarakat terhadap perilaku pengusaha tambang yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat, aparat keamanan pasti akan bergerak dan melindungi para pengusaha tersebut. Dengan demikian, perselisihan antara masyarakat dengan aparat keamanan pun sering terjadi. Perselisihan tersebut tidak jarang menimbulkan adanya pelanggaran HAM bagi Masyarakat. Sebagai contoh, aparat keamanan sering mengeluarkan tembakan untuk mengintimidasi masyarakat, pemukulan yang berlebihan oleh aparat keamanan bahkan sikap aparat keamanan yang tidak segan-segan melemparkan timah panas ke tubuh masyarakat yang terlibat dalam perselisihan antara kedua kubu tersebut.

Keadaan masyarakat setempat yang dahulu sangat sejahtera dan makmur dengan hasil sumber daya alam yang melimpah kini sudah berubah. Sumber-sumber bahan makanan mereka seperti beberapa sungai tempat mencari ikan, udang dan belut telah hancur. Gunung, bukit dan lembah yang selama ini sebagai tempat berburu, tempat tumbuh berbagai tumbuh-

⁸Ibid.

tumbuhan seperti pisang, umbi-umbian, dan makanan hutan lain kini telah hilang. Lokasi tersebut telah berubah menjadi terowongan, lubang yang dalam, genangan air dan longsor yang mudah terjadi di sejumlah tempat.

Berdasarkan uraian di atas penulis menganggap bahwa permasalahan mengenai pertambangan emas di kawasan hutan di Kabupaten Nabire Papua memiliki dampak negatif yang sangat kompleks baik bagi hutan maupun masyarakat. Berdasarkan Pasal 47 Undang Undang Kehutanan, tindakan preventif maupun represif yang perlu dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan munculnya berbagai dampak negatif tersebut adalah pelaksanaan perlindungan hutan dan masyarakat.

Untuk mengetahui upaya perlindungan hutan dan masyarakat terhadap pertambangan emas di Kabupaten Nabire Papua, perlu dilakukan suatu penelitian hukum yang mengacu pada peraturan perundang undangan tertentu. Oleh karena itu, melalui penulisan hukum ini penulis akan melakukan penelitian hukum dengan judul “Perlindungan Hutan dan Masyarakat Terhadap Pertambangan Emas di Kabupaten Nabire Papua”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah penulisan hukum / skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hutan dan masyarakat terhadap pertambangan emas di Kabupaten Nabire Papua?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hutan dan masyarakat terhadap pertambangan emas di Kabupaten Nabire Papua.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang Hukum Lingkungan, tentang Kerusakan Hutan yang disebabkan oleh pertambangan emas di Kabupaten Nabire Papua.

2. Praktis

a) Bagi perumus Peraturan Perundang-undangan, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan masukan dalam rangka menilai isi peraturan perundang undangan yang berlaku saat ini. Saran dan penilaian terhadap isi peraturan perundang-undangan tersebut selanjutnya dapat dijadikan masukan apabila akan dilakukan revisi peraturan perundang undangan.

b) Bagi Pemerintah Kabupaten Nabire, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pemerintah untuk mengetahui keadaan hutan dan masyarakat serta upaya perlindungan hutan dan masyarakat terhadap pertambangan emas yang telah dilakukan selama ini. Dengan diketahuinya keadaan hutan dan masyarakat serta upaya

perlindungannya, diharapkan pemerintah segera melakukan pembenahan-pembenahan maupun perencanaan baru berkaitan dengan upaya perlindungan hutan dan masyarakat terhadap pertambangan emas di Kabupaten Nabire Papua.

- c) Bagi penambang, agar dapat menyadari besarnya resiko yang timbul dari kegiatan pertambangan terhadap hutan. Dengan demikian diharapkan masyarakat penambang dan perusahaan tambang di Kabupaten Nabire mulai menghentikan ataupun mencari alternatif lain mengenai cara menambang yang ramah lingkungan sehingga tidak merusak hutan dan merugikan masyarakat.
- d) Bagi masyarakat luas, dengan munculnya kesadaran para penambang untuk tidak melakukan kegiatan pertambangan yang merusak hutan dan merugikan manusia, masalah-masalah sosial yang merugikan masyarakat luas seperti banjir akan teratasi. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nabire yang selama ini terganggu akibat kegiatan pertambangan yang merusak hutan dapat segera terpulihkan.

E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul, “Perlindungan Hutan dan Masyarakat terhadap Pertambangan Emas di Kabupaten Nabire Papua” merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Penelitian ini mempunyai kekhususan yaitu untuk

mengetahui “Perlindungan Hutan dan Masyarakat terhadap Pertambangan Emas di Kabupaten Nabire Papua”. Penelitian ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu :

1. Deodatus Bhunneka Dutha, Nomor Mahasiswa 0207870, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Judul Penelitian *“Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir di Bantaran Sungai Boyong Turgo Hargobinangun Kabupaten Sleman Yogyakarta*. Tujuan Penelitian Penulis adalah untuk mengetahui “Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan akibat Pertambangan Pasir di Bantaran Sungai Boyong Turgo Hargobinangun Sleman Yogyakarta”. Hasil Penelitian tersebut adalah Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan akibat Pertambangan Pasir di Bantaran Sungai Boyong Turgo Hargobinangun Sleman Yogyakarta belum dapat terlaksana dengan baik karena kondisi bantaran sungai masih rusak dan belum direklamasi, masih banyak terdapat Penambang Pasir yang liar dan berpindah-pindah tempat bahkan sampai merusak bantaran sungai.
2. Reksa Pamuncak, Nomor Mahasiswa 030508407, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Judul *“Perlindungan Hukum Daerah Aliran Sungai/DAS Brantas Berkenaan Dengan Usaha Pertambangan Pasir di Kabupaten Kediri*”. Tujuan Penelitian Penulis

adalah Untuk Mengetahui Pelaksanaan Perlindungan Hukum Daerah Aliran Sungai/DAS Brantas Berkenaan Dengan Usaha Pertambangan Pasir di Kabupaten Kediri. Hasil Penelitian tersebut adalah:

- a) Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan DAS Brantas berkenaan dengan kegiatan usaha Pertambangan Pasir belum berjalan dengan baik terutama pada koordinasi antar Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri
- b) Koordinasi antar Instansi ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik dalam memberikan Perlindungan DAS Brantas berkaitan dengan kegiatan usaha Pertambangan Pasir, kordinasi pada instansi ini masih sebatas pada perlindungan DAS Brantas yang mengalami Kerusakan Lingkungan Akibat dari Kegiatan Usaha Pertambangan Pasir dan pada saat terjasi kasus Kerusakan Lingkungan
- c) Kegiatan Usaha pertambangan Pasir saat ini belum menjadi persoalan yang serius, di dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan sanksi.
- d) Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan sanksi yang diterapkan oleh Perda Nomor 1 Tahun 2005. Belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan sanksi terbukti masih pilih-pilih terhadap para pelaku usaha pertambangan Pasir dan pelaksanaan operasi penertiban yang masih sporadik terhadap Penambang Pasir dengan mesin mekanik

F. Batasan Konsep

Dalam tulisan ini penulis akan menajelaskan mengenai “Perlindungan Hutan dan Masyarakat terhadap Pertambangan di Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire, Papua”.

1. Perlindungan Hutan

Perlindungan hutan yang dimaksud dalam penelitian hukum ini adalah perlindungan kawasan hutan. Perlindungan kawasan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan kawasan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan mempertahankan serta menjaga hak-hak negara dan masyarakat atas kawasan hutan.

2. Masyarakat

Masyarakat yang menjadi sasaran penelitian penulisan hukum ini adalah masyarakat adat maupun masyarakat pendatang yang bermatapencaharian sebagai penambang di Distrik Uwapa Kabupaten Nabire Papua. Selain itu, sasaran penelitian ini ditujukan pula terhadap masyarakat Distrik Uwapa yang merupakan korban banjir akibat penambangan di Kabupaten Nabire Papua dan masyarakat umum di Kabupaten tersebut yang akan menjelaskan mengenai perubahan-perubahan yang terjadi setelah diketahuinya potensi emas di Kabupaten tersebut.

3. Pertambangan

Pertambangan menurut Pasal 1 Undang Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau

seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

4. Pertambangan Emas

Pertambangan emas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertambangan emas yang dilakukan oleh perusahaan tambang emas yang berada di KM 34 Distrik Uwapa yaitu P.T. Hanjun dan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat adat dan masyarakat pendatang yang berada di KM 38 Distrik. Penambangan yang dilakukan oleh masyarakat adat ataupun masyarakat pendatang dapat berupa perorangan ataupun dalam suatu kelompok masyarakat.

5. Distrik

Distrik adalah satuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah kabupaten, dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. kepala Distrik adalah pegawai negeri dan tidak dipilih oleh rakyat.⁹

⁹BPS-BAPPEDDA Kabupaten Nabire, 2009, *Karakteristik Penduduk Distrik Uwapa*, BPS-BAPPEDDA Kabupaten Nabire, Nabire, hlm.viii

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian empiris adalah penelitian yang berfokus pada data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data penunjang.

2. Sumber Data

Oleh karena penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris, penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung, yang terdiri dari:

- a) Data primer meliputi data yang diperoleh secara langsung dari responden dan nara sumber tentang obyek yang diteliti
- b) Data Sekunder, berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku, hasil penelitian, ensiklopedia, black law, dictionary, data-data berupa soft copy, internet dan KBBI.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data dalam penulisan hukum ini adalah mewawancarai responden dan nara sumber serta melakukan studi pustaka.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah KM 34 dan KM 38 Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire, Papua. Lokasi tersebut dipilih

oleh penulis karena pada lokasi tersebut terdapat hutan yang dimanfaatkan sebagai wilayah pertambangan. Hal ini dapat membantu penulis untuk mencapai tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui perlindungan hutan dan masyarakat terhadap pertambangan emas di Kabupaten Nabire Papua.

5. Populasi dan Metode Penentuan Sampel

Mengingat banyaknya jumlah populasi dalam penelitian ini, peneliti mengambil sekelompok warga masyarakat yang bertempat tinggal antara KM 34 sampai KM 38 Distrik Uwapa yang berjumlah sekitar 100. Dalam populasi tersebut, diperkirakan 60 warga diantaranya adalah laki-laki dan 40 warga lainnya adalah perempuan. Populasi pada penelitian ini mempunyai homogenitas atau karakteristik yang sama yaitu sebagai penambang di Distrik Uwapa Kabupaten Nabire.

Sampel adalah sebagian atau contoh dari populasi. Metode penentuan sample yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode *Simple Random sampling* karena pengambilan sample dalam tehnik ini dilakukan secara acak tanpa harus melihat elemen populasinya. Sample yang diambil oleh peneliti untuk mendukung penelitian ini adalah 80 warga yang merupakan penambang di Kabupaten Nabire.

6. Responden

Responden dalam penelitian ini diambil dari sampel yang diuraikan diatas yang terdiri dari 48 warga laki laki dan 32 warga

perempuan yang merupakan korban dari adanya pertambangan emas di kawasan hutan yang merugikan masyarakat di Distrik Uwapa Kabupaten Nabire, Papua. Perhitungan tersebut diperoleh dengan menggunakan metode statistik yang dibuat oleh Krejcie dan Morgan.

7. Metode Analisis

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif.

H. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penalaran deduktif. Prosedur penalaran deduktif adalah prosedur penalaran yang berasal dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum yang kemudian akan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Berkaitan dengan penelitian ini, prosedur penalaran berawal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum mengenai perlindungan hutan dan masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut penulis melakukan analisis fakta terhadap pertambangan emas di Kabupaten Nabire dan selanjutnya akan ditarik kesimpulan mengenai perlindungan hutan dan masyarakat terhadap pertambangan emas di Kabupaten Nabire Papua.